

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang sebelumnya dilakukan perlu dilihat kembali untuk mengetahui masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini. Ada beberapa penelitian terdahulu yang peneliti pelajari.

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Andini dan Sulistyanto (2011:160-174). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2002 – 2006 dengan sampel penelitian sebanyak 123 perusahaan yang tereduksi menjadi 98 observasi untuk kepentingan distribusi normalitas. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur dengan pertimbangan penyajian data mengenai piutang, arus kas operasi, aset, dan penjualan relatif sama. Selain itu, jumlahnya paling banyak dibandingkan industri lainnya sehingga probabilitas perolehan datanya akan makin tinggi dan hasil penelitian diharapkan lebih signifikan. Pengujian model dan hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba sedangkan kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian kedua dilakukan oleh Murtini dan Mansyur (2012:69-78). Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan *go public* di Indonesia. Metoda sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria: bukan perusahaan keuangan (perbankan, asuransi, investasi dan sekuritas) yang memiliki data kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan kualitas auditor pada tahun 2004 sampai dengan 2007. Uji Hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression*) dengan *pooled*. Hasil penelitian ini membuktikan

bahwa kepemilikan manajerial dan komisaris independen memberikan dampak negatif sementara dewan komisaris memberikan dampak positif dan kepemilikan institusional dan kualitas auditor tidak mempengaruhi manajemen laba.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Anggana dan Pratiwi (2013:1-12). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba yang diproksi dengan *discretionary accrual*. Variabel independennya adalah komisaris independen, komite audit, kualitas auditor eksternal dan kepemilikan manajerial. Untuk variabel kontrolnya adalah ukuran perusahaan dan *leverage*. Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tahun 2008-2011. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 35 perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Pengujian model dan hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa komisaris independen, kualitas auditor eksternal dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan dan negatif terhadap manajemen laba. Sebaliknya, komite audit tidak secara signifikan mempengaruhi manajemen laba. Secara umum, dari penelitian ini, mekanisme tata kelola perusahaan yang baik secara signifikan mempengaruhi manajemen laba.

Penelitian yang keempat dilakukan oleh Sari (2014:1-17). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba sedangkan Kepemilikan manajerial, Kepemilikan institusional, Komisaris independen, Ukuran KAP dan Ukuran perusahaan sebagai variabel independent. Populasi yang digunakan perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010 - 2012. Metode pengambilan Sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 22 perusahaan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini adalah bahwa komisaris independen dan ukuran perusahaan mempengaruhi manajemen laba, namun kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Kepemilikan manajerial variabel, kepemilikan institusional, komite audit, direksi independen, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara bersama terhadap manajemen laba sebesar 22,1%.

Saran untuk penelitian lebih lanjut adalah untuk menambah atau mengganti variabel yang ditolak dalam penelitian ini dengan menggunakan variabel lain yang memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian yang kelima dilakukan oleh Kristiani, Sulindawati dan Herawati (2014). Rancangan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Variabel terikatnya adalah manajemen laba dengan *proxy discretionary accrual*. Sedangkan variabel bebasnya adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, komite audit, dan ukuran perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang diakses di BEI dengan periode pelaporan 2009-2013. Sampel penelitian terdiri dari 11 perusahaan manufaktur. Penelitian menggunakan bantuan program *Statistikal Product and Service Solutions* (SPSS) Versi 19 dengan uji *non parametric*. Uji hipotesis menggunakan uji koefisien determinasi (R^2), uji regresi berganda, uji parsial (uji t), dan uji simultan (uji F). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba, komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, komite audit berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen laba, ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen laba, secara simultan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, komite audit dan variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2013.

Penelitian yang keenam dilakukan oleh Widyaningsih (2017:91-107). Obyek penelitiannya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2015. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah *multiple regression analysis*. Penelitian ini menemukan bukti bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing memiliki pengaruh terhadap manajemen laba,

sedangkan kepemilikan institusional dan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian yang ketujuh dilakukan oleh Abed, Al-Attar, dan Suwaidan (2012:216-225). Populasi penelitiannya adalah perusahaan non-keuangan Yordania yang terdaftar di Amman Stock Exchange (ASE) periode 2006-2009 dengan sampel penelitian sebanyak 195 perusahaan. Variabel dependen yang diteliti adalah Manajemen laba yang diukur dengan akrual diskresioner menggunakan model Jones. Karakteristik yang diteliti adalah adanya independensi anggota dewan direksi, ukuran dewan direksi, peran dualitas (CEO / ketua), persentase kepemilikan insider. Selain itu, terdapat dua variabel terkontrol yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan dan leverage keuangan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ukuran dewan direksi merupakan satu-satunya variabel yang memiliki hubungan signifikan dengan manajemen laba. Temuan penelitian ini memiliki implikasi kebijakan yang penting karena mendukung penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan untuk mengendalikan perilaku dewan direksi yang dapat menyebabkan distorsi dalam laporan keuangan tahunan yang dilaporkan. Akibatnya, keandalan dan transparansi laporan keuangan yang dilaporkan dapat ditingkatkan

Penelitian yang kedelapan dilakukan oleh Iraya, Mwangi dan Muchoki (2015:169-178). Sampel penelitian adalah 49 perusahaan yang aktif di NSE periode Januari 2010 sampai Desember 2012. Data sekunder dianalisis dengan menggunakan regresi linier untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Studi tersebut menemukan bahwa manajemen laba berhubungan negatif dengan konsentrasi kepemilikan, ukuran dewan direksi dan independensi dewan, namun berhubungan positif dengan aktivitas dewan dan dualitas CEO. Studi ini merekomendasikan perlunya praktik tata kelola perusahaan yang efektif di perusahaan yang terdaftar di Kenya untuk berkontribusi pada pengurangan manajemen laba dan mencegah kemungkinan runtuhnya perusahaan yang terdaftar di Kenya.

Penelitian yang kesembilan dilakukan oleh Egbunike Amaechi Patrick, Ezelibe Chizoba Paulinus dan Aroh Nkechi Nympha (2015:482-493). Penelitian ini menjelaskan praktik manajemen perusahaan di Nigeria didasarkan pada

meningkatnya kegagalan organisasi perusahaan yang dianggap sebagai ketidakmampuan organisasi untuk memenuhi harapan dari para pemangku kepentingan (stakeholders). Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang dipilih melalui teknik purposive sampling antara periode 2011 – 2014. Data dianalisis menggunakan Jones model, regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik tata kelola perusahaan yang diprosikan dalam ukuran dewan, ukuran perusahaan, independensi dewan, dan kekuatan dari komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik manajemen laba. Hal ini dapat disimpulkan bahwa corporate governance meningkatkan adanya praktik manajemen laba yang ada pada perusahaan di Nigeria.

2.2. Landasan Teori

Teori yang berkaitan dengan masalah pokok penelitian ini adalah tentang mekanisme *Good Corporate Governance*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, manajemen laba dan teori keagenan.

2.2.1 Good Corporate Governance

Menurut Komite Cadbury tahun 1992 – melalui Cadbury Report – mengeluarkan definisi tentang *Corporate Governance*. *Corporate Governance* adalah suatu paket kebijakan yang memuat uraian hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, pekerja dan *stakeholders* lain, baik secara internal maupun eksternal, sebagai suatu bentuk tanggung jawab.

Menurut Forum of Corporate Governance Indonesia (FCGI) 2001, mendefinisikan Good Corporate Governance ialah Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.

Menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) (2004) yang diterjemahkan oleh Indra Surya dan Ivan Yustiavandana

(2006) mendefinisikan Corporate Governance adalah sebagai, Sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, dewan, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Corporate Governance juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. Corporate Governance yang baik dapat memberikan rangsangan bagi dewan dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya yang lebih efisien.

Sedangkan definisi Good Corporate Governance (GCG) menurut Mas Ahmad Daniri (2005:8) adalah sebagai berikut : Suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan dan perundangan dan norma yang berlaku.

Dari definisi diatas bisa disimpulkan bahwa Good Corporate Governance merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur pola hubungan harmonis antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi dan stakeholder lainnya dengan proses yang transparan demi tercapainya tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran kinerja.

Menurut Keputusan Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002 Tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan Good Corporate Governance pada BUMN yang menjelaskan mengenai Prinsip utama GCG yang diperlukan dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan yaitu:

1. Keterbukaan (Transparency), dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

2. Akuntabilitas (Accountability), adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (Responsibility), pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. Independensi (Independency), atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (Fairness) yaitu perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan, serta perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat yang diberikan kepada perusahaan, dan perusahaan juga harus memberikan kesempatan yang sama dalam menerima karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras.

2.2.2 Mekanisme Good Corporate Governance

2.2.2.1 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan. Kepemilikan saham manajerial dapat mensejajarkan antara kepentingan pemegang saham dengan manajer, karena manajer ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan manajer yang menanggung risiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Adanya kepemilikan manajerial dipandang dapat

menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen (Jensen dan Meckling, 1976:339). Dengan demikian, manajer akan bertindak secara hati-hati dalam mengambil keputusan karena mereka akan turut menanggung hasil keputusannya.

Manajer mendapat kesempatan untuk terlibat didalamnya dengan tujuan untuk menyelaraskan dengan pemegang saham. Maka pendanaan dengan sumberdaya internal akan lebih efisien dibandingkan pendanaan dengan sumberdaya eksternal. Melalui kebijakan tersebut manajer diharapkan menghasilkan kinerja yang baik.

Kepemilikan manajerial diukur dengan proporsi saham yang dimiliki perusahaan pada akhir periode keuangan dan dinyatakan dalam persentase. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang notabene adalah mereka sendiri (Mahadwartha, 2003:3)

Secara teoritis ketika kepemilikan saham oleh manajemen rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan antara kepentingan pemegang saham dengan kepentingan manajemen.

2.2.2.2 Kepemilikan Institusional

Menurut Jensen and Meckling (1976) kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara pemilik (*Principal*) dengan manajer (*Agen*). Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi pengawas yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham. Karena dengan keberadaan dan monitor dari kepemilikan Institusional akan menghalangi tindakan manajemen yang memihak kepada kepentingan dirinya sendiri (Oportunistik).

Kelebihan Kepemilikan Institusional antara lain:

- a) Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi
- b) Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam penelitian.
- c) Menurut Xu and Wang, et al. dan Bjuggren et al., dalam Wien (2010) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara positif terhadap nilai perusahaan dan kinerja perusahaan. Hal ini berarti menunjukkan bahwa kepemilikan institusional menjadi mekanisme yang handal sehingga mampu memotivasi manajer dalam meningkatkan kinerjanya yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan.

2.2.2.3 Dewan Komisaris Independen

Struktur good corporate governance di Indonesia memisahkan fungsi dewan komisaris dengan dewan direksi. Dewan komisaris dibagi menjadi 2 (dua) yaitu komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi (KNKG, 2006).

Komisaris independen memang tidak diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan dengan mengingat fungsi komisaris adalah tidak terlibat langsung dengan kegiatan operasional perusahaan, maka sebenarnya seluruh anggota Dewan Komisaris secara teori harusnya bersifat independen. Namun tentunya kita menyadari adanya komisaris yang merupakan representatif dari pemegang saham yang mungkin saja dapat mengalami benturan kepentingan sehingga diperlukan *balancing of role*, agar dapat tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham lainnya (pemegang saham minoritas).

Beberapa persyaratan agar seorang anggota Dewan Komisaris dapat dikatakan sebagai Komisaris Independen. Persyaratan tersebut diantaranya adalah:

1. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) perusahaan tercatat yang bersangkutan.
2. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan.

3. Komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
4. Komisaris Independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di pasar modal.

Independen berarti bahwa komisaris dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah semata-mata untuk kepentingan perusahaan dan tidak terikat atau dipengaruhi oleh pihak-pihak lain yang bisa saja berbeda dengan kepentingan perusahaan. Sehingga fungsi komisaris independen dimaksudkan untuk mendorong dan menciptakan iklim yang lebih independen, obyektif dan meningkatkan kesetaraan (fairness) sebagai salah satu prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya. Peranannya juga dapat mendorong dilaksanakannya prinsip dan praktek tata kelola perusahaan (GCG) pada perusahaan-perusahaan khususnya perusahaan terbuka di Indonesia. Revitalisasi peranan dan fungsi Dewan Komisaris, termasuk didalamnya Komisaris Independen, akan membantu perusahaan dalam implementasi tata kelola perusahaan untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien sehingga bisnis yang dikelolanya menjadi lebih produktif.

2.2.2.4 Komite Audit

Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance pengertian mengenai Komite Audit adalah Suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Komite Audit.

Menurut Hiro Tugiman (1995:8), pengertian Komite Audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota Dewan Komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.

Dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002, menyatakan bahwa Komite Audit adalah suatu badan yang berada dibawah Komisaris yang sekurang-kurangnya minimal satu orang anggota Komisaris, dan dua orang ahli yang bukan merupakan pegawai BUMN yang bersangkutan yang bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporannya dan bertanggungjawab langsung kepada Komisaris atau Dewan Pengawas. Hal tersebut senada dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-643/BL/2012 yang menyatakan bahwa Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dan YPPMI Institute, yang dikutip oleh Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2006:148) Komite Audit pada umumnya mempunyai tanggungjawab pada tiga bidang, yaitu:

1. Laporan Keuangan (Financial Reporting)

Komite Audit bertanggungjawab untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang.

2. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)

Komite Audit bertanggungjawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

3. Pengawasan Perusahaan (Corporate Control)

Komite Audit bertanggungjawab untuk pengawasan perusahaan termasuk didalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

2.2.3 Manajemen Laba

Manajemen laba adalah suatu kondisi dimana manajemen melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, menaikkan, dan menurunkan laba (Schipper, 1989).

Sedangkan Healy dan Wahlen (1999) dalam Anggraeni dan Basuki (2013) menyatakan bahwa earnings management terjadi ketika manajemen menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi-transaksi yang mengubah laporan keuangan, hal ini bertujuan untuk menyesatkan para stakeholders tentang kondisi kinerja ekonomi perusahaan, serta untuk mempengaruhi penghasilan kontraktual yang mengendalikan angka akuntansi yang dilaporkan.

Menurut Sulistyanto (2008) ada dua persepektif penting yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan mengapa manajemen laba dilakukan oleh seorang manajer yaitu :

1. Perspektif informasi

Merupakan pandangan yang menyatakan bahwa manajemen laba merupakan kebijakan manajerial untuk mengungkapkan harapan pribadi manajer tentang arus kas perusahaan di masa depan.

2. Perspektif oportunistis

Merupakan pandangan yang menyatakan bahwa manajemen laba merupakan perilaku oportunistis manajer untuk mengelabui investor dan memaksimalkan kesejahteraannya karena menguasai informasi lebih banyak dibanding pihak lain.

Dalam Positive Accounting Theory terdapat tiga faktor pendorong yang melatarbelakangi terjadinya manajemen laba (Watt dan Zimmerman, 1986) dalam Sulistyanto (2008) yaitu:

1. *Bonus Plan Hypothesis* (Hipotesis Rencana Bonus)

Perjanjian bisnis antara manajer dengan pihak lain menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Variabel yang berkaitan dengan perjanjian tersebut adalah bonus dan kompensasi manajerial. Seandainya kinerja manajer dibawah syarat untuk memperoleh bonus maka manajer akan melakukan praktik manajemen laba agar labanya dapat mencapai tingkat minimal untuk memperoleh bonus. Jika pencapaian terlalu tinggi maka manajer akan mengelola dan mengatur agar laba yang dilaporkan tidak terlalu tinggi dan sisanya akan dilaporkan pada tahun berikutnya.

2. Debt (equity) Hypothesis

Dalam hal perjanjian hutang, manajer akan mengelola dan mengatur labanya agar kewajiban hutang yang seharusnya diselesaikan pada periode tertentu bisa ditunda ke tahun berikutnya. Manajer akan melakukan pengelolaan dan pengaturan jumlah laba untuk menunda bebannya pada periode bersangkutan dan akan diselesaikan pada periode berikutnya. Hal ini dilakukan agar bisa menggunakan data tersebut untuk keperluan lainnya.

3. Political Cost Hypothesis (Hipotesis Biaya Politik)

Hal ini berkaitan dengan masalah pelanggaran regulasi pemerintah. Dengan kata lain, besar kecilnya pajak yang akan ditarik oleh pemerintah bergantung pada besar kecilnya laba yang dicapai perusahaan. Kondisi ini membuat manajer berupaya melakukan pengelolaan dan mengatur laba dalam jumlah tertentu agar pajaknya tidak terlalu tinggi.

2.2.4 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan sebagai hubungan antara agen (manajemen suatu usaha) dan principal (pemilik usaha). Di dalam hubungan keagenan terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (principal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama principal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi principal.

Salno dan Baridwan (2000) menyatakan bahwa penjelasan tentang konsep manajemen laba tidak terlepas dari teori keagenan (*agency theory*). Teori keagenan menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara manajemen (agen) dan pemilik (principal) yang timbul ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai dan mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. Adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik tersebut dapat dipengaruhi kebijakan yang diputuskan manajemen.

Menurut Ujianto dan Bambang (2007) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu

menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.

Agen termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologinya. Principal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agent. Agen mempunyai lebih banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh principal dan agen. Ketidakseimbangan informasi inilah yang disebut dengan asimetri informasi. Adanya asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan dirinya sendiri, mengakibatkan agent memanfaatkan adanya asimetri informasi yang tidak diketahui principal. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara principal dan agen mendorong agen untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada principal, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen. Hal ini memacu agent untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingannya. Salah satu bentuk tindakan agent tersebut adalah agent tersebut adalah yang disebut sebagai *earnings management* (Wardhana, 2009).

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba

Menurut Gideon (2005), Manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Aspek kepemilikan saham oleh manajer tersebut akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang dikelola. Secara umum dapat dikatakan bahwa persentase

tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba.

Hasil penelitian Andini dan Sulistyanto (2011) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian Anggana dan Pratiwi (2013) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan dan negatif terhadap manajemen laba.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Kadek Emi Kristiani, Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan Nyoman Trisna Herawati (2014) yang mengemukakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba

Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan. Kepemilikan institusional tidak mudah percaya terhadap perilaku manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh perusahaan asuransi, bank, dan perusahaan investasi. Kepemilikan institusional dianggap lebih profesional dalam mengendalikan laporan investasinya sehingga kecil kemungkinan mendapat informasi laporan keuangan yang termanipulasi, karena memiliki tingkat pengawasan yang tinggi untuk menghindari terjadinya tindakan manajemen laba. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Astika Sari (2014) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Andini dan Sulistyanto (2011) yang membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian penelitian yang dilakukan Kadek Emi Kristiani, Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan Nyoman Trisna Herawati (2014) yang mengemukakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

2.3.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba

Jensen (1993) dan Lipton dan Lorsch (1992) dalam Beiner, Drobetz, Schmid dan Zimmermann (2003) merupakan yang pertama menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris merupakan bagian dari mekanisme corporate governance. Hal ini diperkuat oleh pendapat Allen dan Gale (2000) dalam Beiner et al. (2003) yang menegaskan bahwa dewan komisaris merupakan mekanisme governance yang penting. Mereka juga menyarankan bahwa dewan komisaris yang ukurannya besar kurang efektif daripada dewan komisaris yang ukurannya kecil.

Dewan komisaris yang berukuran kecil akan lebih efektif dalam melakukan tindakan pengawasan dibandingkan dewan komisaris berukuran besar. Ukuran dewan komisaris yang besar dianggap kurang efektif dalam menjalankan fungsinya karena sulit dalam komunikasi, koordinasi serta pembuatan keputusan.

Hasil penelitian oleh Kadek Emi Kristiani, Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan Nyoman Trisna Herawati (2014) menjelaskan bahwa komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa praktik manajemen laba tidak terpengaruh dengan adanya dewan komisaris independen yang terdapat dalam struktur perusahaan. Fungsi dari dewan komisaris independen masih belum efektif untuk mengurangi praktik manajemen laba.

Berbeda dengan penelitian oleh Elisabeth Andini dan H. Sri Sulistyanto (2011), Umi Murtini dan Rizal Mansyur (2012), serta Gea Rafdan Anggana dan Andri Pratiwi (2013) yang menyimpulkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba baik secara signifikan negatif ataupun positif. Penelitian Ujyanto dan Bambang (2007) serta Nasution dan Doddy (2007) menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif pada variabel manajemen laba.

2.3.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Laba

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan direksi yang bertugas melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit eksternal. Komite audit dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pengawasan terhadap tindakan manajemen yang memungkinkan untuk melakukan manipulasi keuangan. Anggraeni dan Basuki (2013) menemukan bahwa jumlah anggota komite audit yang lebih besar akan dapat menurunkan atau meminimalisir manajemen laba.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kadek Emi Kristiani, Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan Nyoman Trisna Herawati (2014) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Astika Sari (2014) juga menunjukkan hal yang sama yaitu komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba tetapi tidak signifikan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Elisabeth Andini dan H. Sri Sulistyanto (2011) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63), perumusan hipotesis merupakan langkah ketiga dalam penelitian setelah mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang akan diteliti. Hipotesis disusun dan diuji untuk menunjukkan benar atau salah dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat peneliti yang menyusun dan mengujinya.

Berdasarkan dari uraian hubungan antar variabel diatas, maka dapat dibuat rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut :

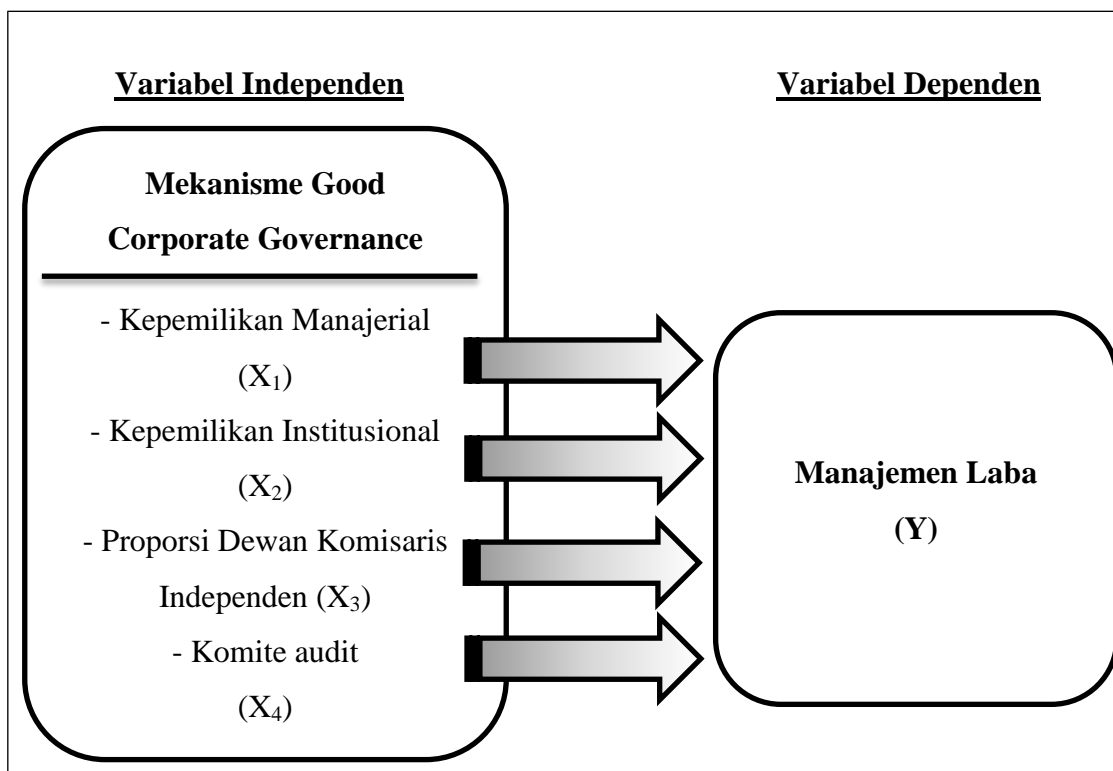
- H1 : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap aktivitas manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang Go Public.
- H2 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap aktivitas manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang Go Public.

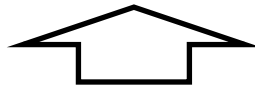
- H3 : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap aktivitas manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang Go Public.
- H4 : Komite audit berpengaruh negatif terhadap aktivitas manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang Go Public.

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas serta dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti. Didalam konsep ini peneliti menggambarkan hubungan variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dan apa saja yang termasuk didalamnya.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual





Landasan Teori	Penelitian Terdahulu
<p>1. Kepemilikan Manajerial (X_1) Manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Aspek kepemilikan saham oleh manajer tersebut akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang dikelola. Secara umum dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba (Gideon, 2005)</p> <p>2. Kepemilikan Institusional (X_2) Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional dapat mengurangi</p>	<p>1. Andini dan Sulistyanto (2011:160-174). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba sedangkan kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba.</p> <p>2. Murtini dan Mansyur (2012:69-78). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan manajerial dan komisaris independen memberikan dampak negatif sementara dewan komisaris memberikan dampak positif dan kepemilikan institusional dan kualitas auditor tidak mempengaruhi manajemen laba.</p> <p>3. Anggana dan Pratiwi (2013:1-12). Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa komisaris independen, kualitas auditor eksternal dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan dan negatif terhadap manajemen laba. Sebaliknya, komite audit tidak secara signifikan mempengaruhi manajemen laba.</p> <p>4. Sari (2014:1-17). Hasil penelitian ini</p>

<p>konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan. Kepemilikan institusional tidak mudah percaya terhadap perilaku manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh perusahaan asuransi, bank, dan perusahaan investasi. Kepemilikan institusional dianggap lebih profesional dalam mengendalikan laporan investasinya sehingga kecil kemungkinan mendapat informasi laporan keuangan yang termanipulasi, karena memiliki tingkat pengawasan yang tinggi untuk menghindari terjadinya tindakan manajemen laba.</p> <p>3. Proporsi Dewan Komisaris Independen (X_3)</p> <p>Tugas komisaris independen yang lebih luas adalah mengawasi dewan direksi perusahaan dalam mencapai kinerja dalam perencanaan bisnis dan memberikan nasihat kepada direksi mengenai penyimpangan atas pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan arah yang ingin dituju oleh perusahaan (Alijoyo</p>	<p>adalah bahwa komisaris independen dan ukuran perusahaan mempengaruhi manajemen laba, namun kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.</p> <p>5. Kristiani, Sulindawati dan Herawati (2014). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba, komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, komite audit berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen laba, ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen laba</p> <p>6. Widyaningsih (2017:91-107). Penelitian ini menemukan bukti bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing memiliki pengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan kepemilikan institusional dan komisaris independen tidak</p>
--	--

<p>dkk, 2004). Manajemen laba terjadi karena adanya konflik kepentingan yang terjadi antara agen dan principal. Dalam hal ini komisaris independen dapat meminimalisirkan conflict tersebut karena akan bersikap objektif dalam mengambil keputusan. Komisaris independen akan memberikan masukan jika terjadi penyimpangan pengelolaan usaha.</p> <p>4. Komite Audit (X₄)</p> <p>Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan direksi yang bertugas melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit eksternal. Komite audit dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pengawasan terhadap tindakan manajemen yang memungkinkan untuk melakukan manipulasi keuangan. Anggraeni dan Basuki (2013) menemukan bahwa jumlah anggota komite audit yang lebih besar akan dapat menurunkan atau meminimalisir manajemen laba.</p>	<p>memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.</p> <p>7. Abed, Al-Attar, dan Suwaidan (2012:216-225). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ukuran dewan direksi merupakan satu-satunya variabel yang memiliki hubungan signifikan dengan manajemen laba. Temuan penelitian ini memiliki implikasi kebijakan yang penting karena mendukung penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan untuk mengendalikan perilaku dewan direksi yang dapat menyebabkan distorsi dalam laporan keuangan tahunan yang dilaporkan.</p> <p>8. Iraya, Mwangi dan Muchoki (2015:169-178). Studi tersebut menemukan bahwa manajemen laba berhubungan negatif dengan konsentrasi kepemilikan, ukuran dewan direksi dan independensi dewan, namun berhubungan positif dengan aktivitas dewan dan dualitas CEO.</p> <p>9. Egbunike Amaechi Patrick, Ezelibe Chizoba Paulinus dan Aroh Nkechi Nympha (2015:482-493). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik tata kelola perusahaan yang diprosikan dalam ukuran dewan, ukuran perusahaan, independensi</p>
---	--

	dewan, dan kekuatan dari komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik manajemen laba.
--	--